

Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Genosida Pada Suku Kurdi Di Irak Selama Rezim Saddam Hussein

RATIH GUMILANG

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk genosida dari segi Hukum Humaniter, bentuk tindakan genosida yang terjadi pada rezim Saddam Hussein, tinjauan hukum terhadap kasus peradilan terpidana Saddam Hussein. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*) dan Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*). Di dalam buku Pengantar Hukum Humaniter, Haryomataram menuliskan Pelanggaran terhadap hukum perang dapat disebut sebagai suatu kejahatan (*war crime*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan keputusan – keputusan pengadilan serta norma – norma hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saddam Hussein digulingkan dan di sidangkan pada pengadilan Nasional Khusus Irak atas tuntutan Pemerintahan AS atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dengan vonis hukuman gantung. Salah satu tuntutan di persidangan perkara Saddam Hussein yaitu Peristiwa pembantaian suku Kurdi di Irak utara, di perkampungan suku Kurdi bernama Halabja. Peristiwa ini merupakan serangkaian kampanye yang terjadi pada hari Jum'at 16 Maret 1988. Peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran Hukum Humaniter dalam bentuk genosida yang dilakukan pada masa kekuasaan Saddam Hussein karena telah memilih Halabja sebagai tempat untuk uji coba senjata pemusnah massal yang baru dibuat oleh perusahaan senjata Irak Atomic Energy.

Selanjutnya Penulis menyarankan Pemerintah Irak meratifikasi terlebih dahulu peraturan Internasional tentang genosida agar Saddam Hussein dipersidang di Persidangan Internasional bukan di Pengadilan Nasional yang beresiko kurangnya rasa keadilan karena dibawah intervensi Pemerintah AS dan Hakim-hakimnya dibawah rasa keinginan balas dendam di masa lalu.

Kata kunci : Hukum Humaniter, *Genosida*, Suku Kurdi, Saddam Hussein

Overview Humanitarian Law Against Genocide In The Kurds in Iraq During The Regime of Saddam Hussein

RATIH GUMILANG

Abstract

This study was conducted to determine the form of genocide in terms of humanitarian law, the shape acts of genocide that occurred in the regime of Saddam Hussein, a review of the law to convict Saddam Hussein's court case. The theory used in this paper is the theory Haryomataram humanitarian law divides into two basic rules, namely the law that governs the manner and means may be used to fight (Law Den Haag / The Hague Laws) and the law governing the protection of combatants and civilians from the effects of war (Geneva Law / The Geneva Laws). In the book Introduction to Humanitarian Law, Haryomataram write Violation of the laws of war can be called as a crime (war crime).

Research methods used in this paper is a normative juridical research. Normative juridical research itself is the research which refers to the legal norms contained in the laws - laws and decisions - the court's decision and norms - norms in the society.

The results showed that Saddam Hussein was overthrown and in sidangkan the Special National Iraqi court on claims the US government for violations of international humanitarian law by the sentence hanging. One of the demands in the trial of Saddam Hussein's case that events massacre of Kurds in northern Iraq, in the Kurdish village of Halabja named. This is a series of campaign events that occurred on Friday, March 16, 1988. This event is a violation of humanitarian law in the form of genocide committed during the reign of Saddam Hussein for choosing Halabja as a place to test the new weapons of mass destruction made by the company Iraqi weapons of Atomic Energy.

Further author recommends the Government of Iraq to ratify the International Convention on the prior regulations that Saddam Hussein's genocide trial dipersidang in International is not in the National Court are at risk because of a lack of a sense of fairness under the US government intervention and Judge - judge under a sense of revenge in the past .

Keywords: Humanitarian Law , Genocide , Kurds , Saddam Hussein